

***Corpus Analysis Discourse Study (CADS): Diskusi “Klitih” melalui Media sosial Twitter
Sebagai Ruang Publik Pada Tahun 2022 – 2023***

***Corpus Analysis Discourse Study (CADS) Discussion of “Klitih” through Social Media Twitter
as a Public Space in 2022 – 2023***

Lina Putri Prabawati^{a,1*}, Siti Nurhidayah^{b,2*}, Sepriza Elysa^{c,3}

^aAlumni Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,

^bAlumni Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,

^cAlumni Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

¹linaputriprabawati1999@mail.ugm.ac.id 082244337453;

²Sitinurhidayah1996@mail.ugm.ac.id 088232982970;

³Seprizaelysa@mail.ugm.ac.id 082288358177

*Penulis koresponden

Abstrak

Maraknya isu “Klitih” memang telah menjadi keresahan dan kegelisahan masyarakat di Yogyakarta, pasalnya kasus “Klitih” yang belakangan terjadi berkaitan dengan tindak penyimpangan seperti kekerasan dan penghilangan nyawa. Oleh karena itu, pada era digitalisasi seperti saat ini, sebagian besar masyarakat merepresentasikan keresahan sekaligus aspirasinya pada media sosial salah satunya melalui Twitter atau yang saat ini disebut dengan X. Pada dasarnya tujuan atau fokus dari studi ini adalah untuk mengetahui perkembangan isu tentang “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta yang dilihat melalui diskusi masyarakat pada media sosial Twitter atau X. Studi akan mengidentifikasi mengenai tanggapan masyarakat terkait kasus “Klitih” di Yogyakarta sebagai bentuk dari advokasi digital yang dilakukan melalui media sosial khususnya Twitter. Metode analisis data dilakukan menggunakan Corpus-Assisted Discourse Study (CADS) dengan menganalisis data cuitan atau tweet pada Twitter. Proses pengumpulan data diperoleh melalui scraping Twitter dengan menggunakan kata kunci terkait “Klitih”. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga wacana dominan yang muncul dalam diskusi atau pembahasan masyarakat mengenai kasus “Klitih” pada media Twitter, yaitu Pariwisata; Stakeholder dan Respon Masyarakat. Diskusi masyarakat yang terungkap memberikan pemahaman tentang kekhawatiran dan aspirasi yang perlu diperhatikan dalam penanganan “Klitih” di Yogyakarta melalui proses kerjasama antar stakeholder yang meliputi pihak kepolisian dan juga pemerintah.

Kata Kunci: Klitih, CADS, Twitter

Abstract

The rise of the “Klitih” issue has indeed become a source of unrest and anxiety for the people in Yogyakarta, because the recent “Klitih” cases are related to deviant acts such as violence and loss of life. Therefore, in the era of digitalization like today, some people represent it on social media, one of which is Twitter or what is currently called X. The purpose or focus of the study is to find out the development of the issue of “Klitih” that occurred in Yogyakarta through discussions on Twitter or X social media. The study will identify community responses as a form of digital advocacy carried out through social media, especially Twitter. The data analysis method is carried out using Corpus-Assisted Discourse Study (CADS) by analyzing tweet data on Twitter. The data collection process was obtained through scraping Twitter using keywords related to “Klitih”. The results show that there are three dominant discourses that emerge in community discussions or discussions about the “Klitih” case on Twitter media, namely Tourism; Stakeholders and Community Response. The community discussions that were revealed provided an understanding of the concerns and aspirations that need to be considered in handling “Klitih” in Yogyakarta through cooperation between stakeholders including the police and the government.

Keywords: klitih, CADS, Twitter

1. Pendahuluan

Dewasa ini perilaku menyimpang dan melanggar hukum rupanya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa namun juga kalangan remaja. Perlu diketahui bahwa kelompok remaja dianggap rentan dalam melakukan tindakan menyimpang serta melanggar hukum, hal ini dikarenakan usia remaja cenderung memiliki emosional yang kurang stabil (Septiani, 2020). Selain itu perkembangan emosi mengarah pada sifat yang sensitif atau temperamental dalam menghadapi berbagai peristiwa. Salah satu fenomena negatif di kalangan remaja yang saat ini ramai menjadi perbincangan adalah “Klitih” yang marak terjadi di DI Yogyakarta. Dalam istilah masyarakat Yogyakarta, “Klitih” diartikan sebagai kelompok remaja yang bepergian tanpa adanya tujuan tertentu dengan mengendarai kendaraan, namun disamping itu mereka juga membawa senjata tajam yang digunakan untuk tindak kekerasan terhadap orang lain (Ichan, 2016). Pengertian tersebut selaras dengan pernyataan dalam (Nasaruddin, 2016) bahwa “Klitih” merupakan bentuk anarkisme yang dilakukan oleh kelompok remaja dengan menggunakan alat bantu seperti pisau, samurai, pedang, parang dan benda-benda tajam lainnya.

Terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2021 kasus kejahatan akibat tindakan “Klitih” mengalami peningkatan dari 52 kasus menjadi 58 kasus atau setara dengan 11,54% (Pahlevi, 2022). Dari kasus

tersebut pelaku yang berhasil diproses hukum melebihi 100 orang, terbagi menjadi kelompok-kelompok dan sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar. Umumnya tindakan “Klitih” dilatarbelakangi oleh beberapa motif seperti meningkatkan eksistensi kelompok di lingkungan geng, namun tidak jarang juga yang didasari atas rasa dendam karena permusuhan antar kelompok atau geng (Riyadi, 2021). Kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat Yogyakarta semakin meningkat karena akhir-akhir ini tindakan “Klitih” tidak lagi pandang bulu. Tindakan yang dilakukan bukan hanya melukai namun juga sampai memakan korban jiwa, bahkan sasaran mereka tidak hanya antar kelompok saja melainkan juga beberapa orang yang mereka temui di jalanan tanpa mereka kenali siapa orang tersebut.

Pada era digitalisasi seperti saat ini, respon masyarakat tentang keresahan dan kegelisahan akibat “Klitih” di Yogyakarta banyak direpresentasikan pada media sosial, hal ini tidak terlepas dengan kecakapan masyarakat Yogyakarta dalam mengakses teknologi. Pada tahun 2021, Provinsi DI Yogyakarta mendapat skor indeks literasi digital terbaik (databoks, 2022), sehingga bisa dikatakan jika sebagian besar masyarakat Yogyakarta memang sudah memiliki literasi digital yang baik. Adapun salah satu media sosial yang sering digunakan sebagai interaksi terkait “Klitih” adalah Twitter. Berdasarkan Kusuma (2020), Yogyakarta masuk kedalam 5 provinsi yang berkontribusi pada percakapan isu-isu mengenai politik daerah/nasional melalui Twitter, dengan demikian tidak menutup kemungkinan jika persoalan mengenai “Klitih” juga ramai diperdebatkan di Twitter.

Keberadaan platform digital berupa sosial media dianggap mampu menciptakan ruang publik baru atau *new public sphere* bagi masyarakat untuk lebih mudah berdiskusi dan berpendapat termasuk juga pada isu “Klitih”. Berbagai macam pendapat berkaitan isu “Klitih” di Twitter mengundang perdebatan dari semua kalangan masyarakat, adapun diskusi tersebut meliputi beberapa hal salah satunya mengenai respon stakeholder dalam mengatasi isu “Klitih” yang terkesan lambat. Penanganan “Klitih” di Yogyakarta pada dasarnya meliputi beberapa aktor yang harus berperan baik dari pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Kekhawatiran fenomena “Klitih” yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar Yogyakarta melainkan juga pendatang seperti wisatawan, mahasiswa dan lain sebagainya.

Artikel ini membahas fenomena "Klitih" yang marak terjadi di Yogyakarta, khususnya di kalangan remaja. Fokus dari kajian adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan isu “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta melalui diskusi pada media sosial Twitter. Selain itu studi ini juga mengidentifikasi tanggapan masyarakat sebagai bentuk dari advokasi digital yang dijalankan melalui pengguna twitter. Penggunaan twitter sebagai ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat diharapkan mampu menggiring opini masyarakat guna menyampaikan kegelisahan dan masukan dalam penanganan sekaligus penanggulangan yang tepat terhadap isu klitih yang ada di Yogyakarta.

2. Metode

Analisis data yang digunakan pada studi ini adalah metode Corpus-Assisted Discourse Study (CADS) dengan menganalisis data cuitan/tweet pada Twitter. Pengumpulan data tersebut diperoleh melalui scraping Twitter dengan menggunakan kata kunci terkait "Klitih". Penggunaan CADS berfungsi untuk mengungkapkan berbagai aspek berupa pola respon masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan klitih yang muncul melalui cuitan twitter. Metode CADS mampu menangkap makna yang tidak terlihat secara eksplisit dan memberikan penjelasan terhadap pola yang muncul (Partington et al., 2013). Terdapat dua langkah besar yang digunakan dalam metode CADS yaitu tahap *Corpus Linguistic* (CL) dan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Tahapan CL dilakukan dengan memilih media, menentukan korpora dan membuat data set. Selanjutnya tahapan CDA dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan analisis wacana kritis (Kusumasari et al., 2021).

Pada tahapan pertama penulis melakukan *Scraping* Data dari Twitter dengan menggunakan kata kunci / *keyword* "Klitih"; "Klitih Jogja"; dan "Klitih Yogyakarta". Scraping data ini dilakukan pada mulai dari Januari 2022 hingga Juni 2023. Rentang waktu ini dipilih penulis karena penulis ingin melihat tweet / cuitan terbaru terkait dengan klitih. Penulis menggunakan program Python dan Jupyter Notebook untuk membantu penulis membuat narasi komputasi. Pada tahap ini penulis mendapatkan 1982 tweet / cuitan. Selanjutnya, pada tahap kedua penulis menggunakan aplikasi AntConc untuk mengetahui frekuensi. Pada tahap ini penulis melakukan pemahaman terhadap kata kunci dan frekuensi dari korpora bahasa yang muncul. Kemudian akan dihubungkan dengan konteks sosial politik. Pada tahap ini penulis mulai menemukan konstruksi ideologi dari pesan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Penanganan Klitih DI Yogyakarta

Maraknya klitih yang terjadi di Yogyakarta pada malam hari yang didominasi pelakunya adalah anak-anak berusia dibawah 18 tahun maka pemerintah kota Yogyakarta dalam upaya penanganan klitih mengeluarkan peraturan mengenai jam malam anak melalui Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2022 yang didalamnya berisikan larangan meninggalkan rumah setiap hari bagi anak usia 18 tahun kebawah dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB, kecuali pada kondisi tertentu saja. Apabila adanya pelanggaran dari pemberlakuan jam malam anak maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, dilanjutkan dengan peringatan tertulis dan apabila masih melakukan pelanggaran maka akan masuk ke dalam balai pembinaan untuk merehabilitasi yang melakukan pelanggaran jam malam. Jika masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan rehabilitasi untuk orang tua atau wali dari anak bersangkutan.

Upaya penanganan klitih dilakukan juga dengan dilaksanakannya beberapa program yang ada di Sleman seperti FORAN (Forum Anak Pelajar Sleman), serta PIKIR (Pusat Konseling Remaja) guna untuk

pemberdayaan anak yang ada di Sleman untuk menghasilkan hal positif yang bermanfaat (dprd-diy.go.id, 2022). Pemerintah kabupaten Sleman juga membentuk satuan tugas anti klitih melalui Keputusan Bupati Sleman nomor 24/Kep.KDH/A/2022 yang memiliki tugas dalam menyusun perencanaan kebijakan guna mencegah kekerasan anak di jalanan (dprd.slemankab.go.id, 2022). Selain itu juga didirikannya kelompok Jaga Warga yang memiliki tugas dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat berdasarkan peraturan Gubernur DIY Nomor 28 tahun 2021. Dalam merespon maraknya klitih di DIY, pada lokasi-lokasi rawan klitih Jaga Warga tingkat kelurahan melaksanakan penjagaan dan mengawasi aktivitas anak-anak setelah jam belajar serta melakukan koordinasi dengan polsek dan bhabinkamtibmas jika ada kegiatan anak muda yang meresahkan (Rasyid, 2022).

Kepolisian memiliki peranan penting dalam penanganan permasalahan klitih yang tugasnya memelihara keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat sehingganya masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tindakan kejahatan khusus klitih. Kepolisian daerah DIY dalam upaya penanganan klitih yang ada dilakukan tindakan preemtif melalui sosialisasi mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan klitih, dan melakukan patroli dialogis yang dilakukan diberbagai sekolah dan desa-desa yang ada di DI Yogyakarta serta memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui literasi digital yang membahas seputar klitih. Tindakan lain yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan ada di sekitar masyarakat melalui patroli keamanan di berbagai daerah yang ada di DI Yogyakarta, hal ini bentuk upaya preventif yang dilakukan kepolisian Yogyakarta, dan melakukan penegakan hukum bagi para pelaku klitih (Fitriansyah, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suci Iriani Sinurya di tahun 2022 menjelaskan bahwa “klitih” pada mulanya merupakan tawuran antar geng sekolah yang kemudian berubah karena terjadi perluasan perilaku. Pada penelitian tersebut di paparkan data usia pelaku yang terlibat dalam kejahatan jalanan dari tahun 2016 – 2021 merupakan anak usia 13-15, 16-18, dan 18 tahun keatas. Hal ini menggambarkan bahwa kejahatan jalanan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak pada jenjang SLTP juga menjadi pelaku kejahatan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penanganan klitih yang dilakukan oleh pemerintah masih belum cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Sinurya, 2022).

B. Penggunaan Sosial Media Twitter Sebagai *Public Sphere*

Ruang publik atau Public Sphere pada mulanya dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Habermas menentang adanya dominasi feodal dalam komunikasi publik. Ruang publik bagi masyarakat sipil disebut sebagai arena diskusi publik, berinformasi dan resonansi, Pers yang independen didasarkan oleh pasar bebas yang memiliki signifikansi penting (Cela, 2015). *Public Sphere* merupakan komponen organisasi sosial politik dimana ini menjadi ruang bagi orang sebagai masyarakat untuk menyampaikan pandangan sehingga dapat mempengaruhi institusi politik (Castells, 2008).

Perkembangan teknologi saat ini menciptakan ruang baru bagi publik untuk dapat berdiskusi dan berinformasi secara digital. Beberapa jurnal berargumen bahwa keberadaan sosial media merupakan salah satu bentuk *public sphere* (Shao & Wang, 2017; Cela, 2015). Sosial media sebagai *public sphere* dalam perspektif *stakeholder* digunakan sebagai media preferensi komunikasi. *Stakeholder* dengan *salience* yang tinggi lebih cenderung berpartisipasi dalam sosial media dibandingkan *stakeholder* dengan *salience* yang lebih rendah (Shao & Wang, 2017). Penggunaan sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube* memerankan peran penting dalam gerakan sosial di beberapa negara seperti Arab, Mesir, dan protes kapitalisme global di Amerika Serikat (SEN, 2012). Hal ini dapat diartikan bahwa dampak penggunaan media sosial dalam pembentukan *public sphere* cukup besar.

C. Analisis data dari twitter.

Setelah dilakukan proses analisis melalui scraping data dari Twitter dengan kata kunci “Klitih”, hasil yang diperoleh menunjukkan sebanyak 1982 tweet dengan 45.198 kata. Hasil diskusi melalui cuitan atau tweet tersebut rupanya sangat beragam mulai dari diskusi tentang update terkini seputar terjadi atau kasus “Klitih”, kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat terkait kasus “Klitih”, bahkan sampai dengan tuntutan masyarakat terhadap pihak-pihak tertentu dalam rangka menertibkan persoalan kasus “Klitih”. Hal ini dapat diartikan bahwa diskusi masyarakat tentang tindakan “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta sangatlah beragam. Berdasarkan analisis pada konten yang dituliskan dalam tweet atau cuitan di Twitter tersebut, secara garis besar penulis mendapatkan tiga wacana yang sering muncul yaitu tentang klitih dan pariwisata, stakeholder terkait, dan respon masyarakat.

1) Klitih dan Pariwisata

Seperti yang diketahui bahwa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki daya tarik tinggi bagi para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Beragam destinasi budaya, alam, kuliner dan lain sebagainya ditawarkan oleh Yogyakarta sebagai bentuk mengenalkan potensi Yogyakarta kepada seluruh pendatang. Jika dikaitkan dengan masalah atau persoalan kasus “Klitih”, tentu saja “Klitih” sangat berpengaruh dengan aspek pariwisata di Yogyakarta. Hal ini karna semakin maraknya kasus “Klitih” yang terjadi dikhawatirkan mampu memberikan efek negatif kepada pariwisata yang ada di Yogyakarta, yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan rasa aman dan nyaman para wisatawan menjadi terancam dengan adanya kejahatan yang seringkali terjadi di jalanan ini (Sinuraya, 2022). Kasus “Klitih” yang dikaitkan dengan aspek atau sektor pariwisata di Yogyakarta ini muncul dari tweet atau cuitan yang ditulis oleh masyarakat melalui Twitter. Adapun beberapa kata kunci yang menjadi sorotan terkait pariwisata di Yogyakarta yang dihasilkan melalui scraping data Twitter adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Keyword Tekait dengan Pariwisata

Frekuensi	Keyword	Frekuensi	Keyword	Frekuensi	Keyword
21	Jogjaistimewa	9	angkringan	4	titiknol
21	liburan	7	bantul	3	malioboro
18	wisatawan	6	hotel	3	travel
15	keamanan	6	sleman	3	tugu
14	main	5	kenyamanan	3	wates
14	taman	5	pariwisata	2	Tamanpinter
14	wisata	4	imogiri	1	parangtritis

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat melihat bahwa kata kunci “Jogjaistimewa” dan “liburan” menjadi keyword yang paling dominan yang muncul sebanyak 21 kali. Hal ini tentu saja dikarenakan Yogyakarta yang dikenal sebagai kota wisata dengan tagline jogjaistimewa. Pada dasarnya masih terdapat beberapa kata kunci lain disamping kedua kata dominan sebelumnya seperti, “angkringan” serta lokasi wisata diantaranya “bantul, sleman, imogiri, malioboro, tugu, wates, tamanpinter, dan parangtritis”. Selain itu, terdapat pula kata kunci yang masih berkaitan dengan pariwisata yaitu, “wisatawan, main, taman, wisata, hotel, dan travel”. Bahkan yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah terkait munculnya kata “keamanan” dan “kenyamanan” yang juga tidak terlepas dari pembahasan isu “klitih”. Dalam rangka mempermudah melihat wacana atau kata kunci yang muncul terkait pariwisata dalam diskusi dan pembahasan isu “Klitih” pada Twitter, berikut ini terdapat visualisasi data dalam bentuk Wordcloud yang memperlihatkan bahwa kata “Jogjaistimewa” dan “liburan” lebih dominan dibandingkan kata lainnya terkait dengan pariwisata.



Gambar 1 Wordcloud Klitih dan Pariwisata

Sumber: data diolah penulis

Meskipun hanya terdapat dua kata kunci dominan sebagaimana ditunjukkan diatas, bukan berarti kata kunci yang lain tidak menjadi masalah khususnya adalah “keamanan” dan “kenyamanan”, hal ini mengingat bahwa Yogyakarta memiliki julukan “Jogja Berhati Nyaman” yang seringkali menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan ke Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa sektor dan aspek pariwisata tidak mampu terlepas dari persoalan “klitih”. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY dalam Harian Jogja (2023) menyatakan bahwa dengan adanya klitih di DIY berdampak pada citra pariwisata DIY. Sehingga melalui pernyataan tersebut secara langsung mengkonfirmasi bahwa peristiwa “klitih” sangat berkaitan dengan sektor pariwisata Yogyakarta.

2) Klitih dan Stakeholder

Pada dasarnya tindakan “Klitih” memang tidak termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan juga tindak pidana, selama tindakan tersebut tidak disertai dengan kekerasan dan kejahatan yang melukai ataupun menimbulkan korban jiwa (Septiani, 2020). Namun demikian, ketika kasus “Klitih” telah mengarah dan identik dengan tindak kekerasan serta kejahatan lain yang berujung pada kerugian antara masyarakat, tentu saja hal ini menimbulkan rasa cemas dan gelisah di kalangan masyarakat baik asli maupun pendatang yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itu perlu adanya respon dan penanganan oleh seluruh pihak yang bersangkutan untuk senantiasa bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut. Beragam stakeholder diharapkan mampu terlibat dalam penanganan kasus “Klitih” dalam rangka mengatasi dan memberikan solusi atas tindakan yang mengganggu masyarakat Yogyakarta.

Setelah melakukan analisis kata kunci/keyword “Klitih” yang diperoleh melalui tweet atau cuitan pada Twitter, diperoleh beberapa keyword pada diskusi “Klitih” di Twitter yang mengarah pada aktor ataupun stakeholder. Adapun stakeholder yang dimaksud disini adalah pemangku kepentingan yang dianggap bertanggung jawab atas kasus “Klitih” di Yogyakarta seperti pemerintah atau stakeholder lain yang terlibat dalam penanganan kasus “Klitih”. Berdasarkan hasil scraping data, ditemukan beberapa cuitan twitter yang mengarah pada stakeholder yang terlibat dalam penanganan kasus “Klitih” yakni sebagai berikut.

Tabel 2 Keyword yang Muncul dalam Stakeholder

Frekuensi	Keyword	Frekuensi	Keyword
35	Poldajogja	3	Polres
25	Polisi	2	Bupati
14	masyarakat	2	Gubernur
13	polresjogja	1	pemkotjogja
6	Polresta	1	Pemkot
2	pemerintah	1	polrestasurakar

Saat ini tindakan “Klitih” seringkali mengarah pada tindakan kriminal dengan melalui kekerasan yang berakibat terhadap penghilangan nyawa seseorang, oleh karena itu masyarakat dengan gencar menyuarakan kegelisahannya melalui media sosial yang ditujukan kepada aparat keamanan. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk mencegah, menindak serta mengatasi tindak kejahatan “Klitih” guna menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat (Sinaga, R., 2023). Peran Sentral Kepolisian bisa dilakukan melalui pendekatan preventif sebagai upaya pencegahan “Klitih” seperti pelaksanaan patroli dan pengawasan, sosialisasi, penguatan struktur sosial, serta pembelajaran/edukasi kepada khalayak mengenai konsekuensi dan bahaya yang ditimbulkan tindakan “Klitih”

Selain itu, Kepolisian sebagai aparat keamanan yang dianggap memiliki peran utama dalam penanganan “Klitih” juga diharapkan melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau sekolah, komunitas serta keluarga (Sumantri, 2023). Hal ini tidak lain bertujuan untuk identifikasi risiko dan pembelajaran tentang konflik, penyelesaian masalah dan keterampilan sosial bagi kalangan remaja. Kerja sama antar pihak terkait diharapkan mampu meningkatkan suatu kesadaran yang dapat mengubah perilaku-perilaku negatif dan kurang baik yang memicu terjadinya tindak kejahatan yaitu “Klitih”.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai peran kepolisian dalam penanganan masalah dan kasus “Klitih”, bukan berarti *stakeholder* lain tidak memiliki peran dan bertanggungjawab atas penanganan “Klitih” khususnya adalah pemerintah. Sama halnya dengan kepolisian, pemerintah juga harus bertindak dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat di tengah maraknya kasus “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta. Sebagai otoritas pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, pemerintah dituntut untuk lebih memberikan aktif lagi dalam berkoordinasi dengan Kepolisian dalam rangka penegakkan hukum yang jelas bagi pelaku “Klitih” melalui regulasi dan peraturan. Tidak hanya itu, pemerintah harus lebih fokus dalam pengentasan masalah “klitih” karena jika tidak dikhawatirkan akan memberikan citra buruk terhadap Yogyakarta.

3) Respon masyarakat terkait dengan Klitih

Ketika kita berbicara mengenai kriminalitas tentu saja akan menimbulkan berbagai respon masyarakat terhadap fenomena kriminalitas tersebut. Salah satu respon yang sering muncul adalah ketakutan akan kriminalitas. Bahkan sebuah penelitian menyebutkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih tempat tinggal di daerah dengan angka kriminalitas yang rendah (Furstenberg, 1971). Hal ini relevan dengan persoalan isu kasus “Klitih” yang belakangan terakhir terjadi di Yogyakarta, dimana masyarakat memberikan respon terhadap tindakan “Klitih” di Yogyakarta dengan munculnya rasa resah dan juga takut. Dalam analisis diskusi dan pembahasan masyarakat di Twitter dengan kata kunci “Klitih”, terdapat ungkapan keresahan dan ketakutan masyarakat yang dituliskan melalui pada tweet atau cuitan. Berikut ini adalah kata-kata yang muncul mengenai respons masyarakat terkait dengan Klitih yang muncul pada cuitan Twittwer.

Tabel 3 Keyword terkait dengan respons masyarakat

Frekuensi	Keyword	Frekuensi	Keyword
71	takut	10	Rindu
14	Ngeri	4	meresahkan
13	Wedi	3	Aneh
10	Males	2	Muak

Sumber: data diolah penulis

Tabel di atas merupakan kata-kata yang sering muncul pada diskusi masyarakat mengenai kata kunci “Klitih” melalui media sosial Twitter. Data tersebut menunjukkan terdapat kata yang dominan muncul adalah “takut” yang muncul sebanyak 71 kali. Disamping itu, terdapat respon lain dari masyarakat yang mengarah pada rasa takut seperti “ngeri” dan “wedi”(kata lain Takut dalam bahasa Jawa). Hal ini artinya, kasus “Klitih” yang terjadi seakan-akan mengikis ketenangan dan rasa nyaman karena dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang relatif tinggi di kalangan masyarakat Yogyakarta. Selain tabel di atas, penulis juga menyajikan wordcloud dari kata – kata yang diperoleh dari scraping data Twitter dengan kata kunci “Klitih” yang mengarah pada respon masyarakat, dan terlihat jika kata “takut” menjadi kata yang mendominasi.



Gambar 3 Wordcloud terkait dengan Respons Masyarakat

Sumber: data diolah penulis

Selain kata “takut”, terdapat kata yang mungkin aneh jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai respon masyarakat terhadap kasus “Klitih” yakni kata “Rindu”. Kata “Rindu” sebagaimana tertulis pada tabel 3 di atas pada dasarnya muncul dalam cuitan atau tweet: *“Jogja terbuat dari angkringan, pulang, rindu, klitih, gelut, gelut dan gelut”*. Hal ini merupakan salah satu bentuk aspirasi dan ungkapan masyarakat dalam merespon persoalan mengenai “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta. Ungkapan tersebut dapat dikatakan sebagai ungkapan Satire masyarakat dalam memberikan respon terhadap fenomena “Klitih”, Satire sendiri merupakan gaya bahasa yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan sindiran. Hal ini dikarenakan kalimat sebenarnya adalah *“Jogja terbuat dari rindu,*

pulang dan ankringan” yang merupakan tagline ikonik di Teras Malioboro 1. Selanjutnya terdapat juga kata “Muak” dalam tweet: “Iya cok, cuma pemikiran sekilas aja kek masalah2 di jogja nih kek kerusuhan dan lain2 ga kelar2. sebagai pembelaan dari warga2 sekitar biar aman gitu, belum lagi klitih, udah muak bgt bgst.”. Berdasarkan kalimat tersebut kita dapat melihat bahwa muncul rasa muak dari masyarakat terkait penanganan klitih. Menurut Kamun Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Muak” diartikan sebagai rasa bosan atau jijik mendengar bahkan melihat. Respon - respon masyarakat sebagaimana di atas memperlihatkan bahwa adanya “Klitih” ini sudah menimbulkan ketakutan dan keresahan pada semua kalangan masyarakat di Yogyakarta.

D. Diskusi

Twitter menjadi salah satu platform media sosial yang memiliki jaringan publik dan afiliasi pengguna melalui pembuatan postingan (Boyd, 2010). Setiap pengguna dapat mengirimkan pesan atau postingan sepanjang 280 karakter, hal ini yang menjadikan twitter dianggap sebagai situs populer yang menyediakan alat atau perangkat bagi khalayak untuk berkomunikasi dan bertukar informasi (Altoaimy, 2018). Pengguna yang mengirimkan postingan pada laman twitter bisa ditanggapi oleh pengguna akun twitter lainnya dengan beragam komentar maupun tanggapan. Adapun melalui komentar/tanggapan tersebut yang kemudian melahirkan berbagai macam tweet sehingga memicu adanya ruang dan grup diskusi mengenai berbagai isu. Dalam konteks “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta, berbagai pembahasan menarik muncul dan mulai didiskusikan pada cuitan Twitter, beberapa hal yang menjadi keberlangsungan pembahasan mengenai isu “Klitih” diantaranya adalah pariwisata, stakeholder, dan respon/tanggapan masyarakat.

Ketiga wacana diatas merupakan pemetaan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui keyword/cuitan pada Twitter mengenai “Klitih”. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa isu “Klitih” yang terjadi di Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap pariwisata, seperti yang diketahui bahwa Yogyakarta dikenal dengan sektor pariwisata sebagai penunjang perekonomian daerah. Berbagai wisata berbasis budaya, alam, ekonomi kreatif dan lain sebagainya berhasil menarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Adanya kasus “Klitih” yang belakangan sering kali menjadi topik pembahasan akibat tindak kekerasan bahkan sampai dengan penghilangan nyawa, tentu saja menimbulkan rasa khawatir dan resah bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Respon dan emosional individu dalam menanggapi “Klitih” juga relatif beragam, namun sebagian besar diantaranya merasakan kegelisahan dan rasa takut. Oleh karena itu perlu adanya penanganan yang lebih intensif untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat baik pendatang ataupun warga lokal Yogyakarta.

Penanganan dalam kasus “Klitih” tentu saja melibatkan beberapa stakeholder sebagai penanggungjawab baik pemerintah, aparatur keamanan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Namun berdasarkan cuitan Twitter, aktor yang paling banyak dibahas dalam penanganan “Klitih” cenderung

pada aparaturnya keamanan yaitu Polda Yogyakarta. Hal ini bukan tanpa alasan, tindakan “Klitih” yang mengarah pada tindak pidana dan kriminalitas tentu saja perlu melibatkan aparaturnya keamanan sebagai penegak hukum. Sehingga pihak kepolisian menjadi aktor utama yang dianggap mampu menangani kasus “Klitih” dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Meskipun demikian kerjasama dan koordinasi antara kepolisian dan lembaga lain juga harus dilakukan guna mempercepat penanganan agar kasus “Klitih” tidak berimbas pada sektor-sektor unggulan Yogyakarta.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis menunjukkan adanya tiga wacana dominan dalam pembahasan "Klitih" di Twitter, yaitu wacana mengenai Pariwisata; Stakeholder; dan Respon Masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penanganan kasus "Klitih" memerlukan kerja sama antara stakeholder terkait, terutama kepolisian dan pemerintah. Diskusi masyarakat yang terungkap melalui Twitter memberikan pemahaman tentang kekhawatiran dan aspirasi yang perlu diperhatikan dalam penanganan "Klitih" di Yogyakarta. Wacana pertama terkait dengan pariwisata dimana seperti yang diketahui bahwa Yogyakarta dikenal dengan sektor pariwisata sebagai penunjang perekonomian daerah. Wacana kedua terkait dengan respon dan emosional individu dalam menanggapi “Klitih” sebagian besar diantaranya merasakan kegelisahan dan rasa takut. Wacana ketiga terkait dengan stakeholder dimana aktor yang paling banyak dibahas dalam penanganan “Klitih” cenderung pada aparaturnya keamanan yaitu Polda Yogyakarta.

Mengacu pada fenomena tersebut, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran terkait dengan fenomena klitih. Pertama, memaksimalkan pemberlakuan kebijakan jam malam untuk seluruh wilayah di Provinsi Yogyakarta oleh kepolisian atau Polda Yogyakarta. Kedua, perlunya penambahan jumlah titik CCTV sebagai bentuk kontrol dan pengawasan terkait dengan kondisi *real time* Yogyakarta secara umum dan daerah rawan Klitih secara khusus. Ketiga, memaksimalkan tugas satgas Penanganan Klitih untuk memberikan edukasi kepada orang tua maupun anak remaja terkait dengan konflik dan penyelesaiannya. Dengan beberapa saran dan rekomendasi, penulis berharap bahwa penanganan dan penanggulangan kasus “Klitih” di Yogyakarta dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan perilaku “Klitih” sangat kompleks baik secara sosial dan ekonomi, mengingat bahwa Yogyakarta sangat bergantung pada sektor pariwisata sehingga diperlukan jaminan atas keselamatan dan rasa nyaman bagi seluruh pendatang dan juga masyarakat local.

F. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada tim penulis yang telah berusaha untuk menyelesaikan artikel ini.

G. Referensi

- Altoaimy, L. (2018). Driving change on Twitter: A corpus-assisted discourse analysis of the Twitter debates on the Saudi ban on women driving. *Social Sciences*, 7(5), 81.
- Boyd, D. (2010). *Social Network Sites as Network Publics: Affordances, Dynamic, and Implication*. Routledge.
- Castells, M. (2008). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. *ANNALS AAPSS*, 616, 78 - 93.
- Cela, E. (2015, Mei - Agustus). Social Media as a New Form of Public Sphere. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 2(3), 126 - 131.
- databoks. (2022, July 18). *Literasi Digital Yogyakarta Terbaik Nasional, Ini Kekuatan Utamanya*. Databoks. Retrieved July 4, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/literasi-digital-yogyakarta-terbaik-nasional-ini-kekuatan-utamanya>
- dprd-diy.go.id. (2022, January 12). *Upaya Pemerintah dalam Penanganan Klitih di DIY - e-Parlemen DPRD DIY*. DPRD DIY. Retrieved July 14, 2023, from <https://www.dprd-diy.go.id/dp3ap2kb-sleman-laporkan-upaya-pencegahan-klitih-di-sleman/>
- dprd.slemankab.go.id. (2022, March 26). *Pemkab Sleman membentuk Satgas Anti "Klitih"*. DPRD KABUPATEN SLEMAN. Retrieved July 14, 2023, from <https://dprd.slemankab.go.id/2022/03/26/pemkab-sleman-membentuk-satgas-anti-klitih/>
- Fitriansyah, M. S. (2022, April 20). *3 Strategi Jitu Polda DIY untuk Mencegah Aksi Kejahatan Jalanan*. JPNN.com Jogja. Retrieved July 14, 2023, from <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/2399/3-strategi-jitu-polda-diy-untuk-mencegah-aksi-kejahatan-jalanan-di-yogyakarta>
- Furstenberg, F. F. (1971, Autumn). Public Reaction to Crime in the Streets. *The American Scholar*, 40(4), 601 - 610. <https://www.jstor.org/stable/41209894>
- Ichan. (2016). *Nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia*. Rineka Cipta.
- KBBI. (n.d.). *KBBI Daring - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. KBBI Daring. Retrieved July 16, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>
- Kusuma, M. (2020, January 8). *Drone Emprit Academic Open Data*. Drone Emprit Academic Open Data. Retrieved July 4, 2023, from https://dea.uii.ac.id/user/lihat_publicasi/memotret-pengguna-aktif-twitter-dan-mungkin-internet-di-indonesia-berdasarkan-peta-sebaran-cuitan-tw
- Kusumasari, B., Rajiyem, & Santoso, A. D. (2021). *BIG DATA UNTUK ILMU SOSIAL: ANTARA METODE RISET DAN REALITAS SOSIAL*. UGM PRESS.
- Leon, Y. (2023) *Coreng Citra Jogja, Begini Pengaruh Klitih Terhadap Sektor Wisata*, *Harianjogja.com*. Available at:

- https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/12/510/1125989/coreng-citra-jogja-begini-pengaruh-klitih-terhadap-sektor-wisata#google_vignette (Accessed: 30 July 2024).
- Nasaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Pustaka Setia.
- Pahlevi, R. (2022). *Jumlah Kasus dan Pelaku Klitih di Jogja Meningkat pada 2021*. databoks. Retrieved 7 4, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021#:~:text=Menurut%20keterangan%20Polda%20DIY%20yang,dengan%20102%20pelaku%20diproses%20hukum.>
- Partington, A., Duguid, A., & Taylor, C. (2013). *Patterns and Meanings in Discourse: Theory and Practice in Corpus-assisted Discourse Studies (CADS)* (A. Partington, Ed.). John Benjamins Publishing Company.
- Rasyid, S. (2022, April 6). *Aksi Klitih Masih Terjadi, Pemda DIY Lakukan Cara Ini*. Merdeka. Retrieved July 14, 2023, from <https://www.merdeka.com/jateng/aksi-klitih-masih-terjadi-pemda-diy-lakukan-cara-ini.html>
- Riyadi, A. (2021). Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klitih di DI Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 91-102.
- SEN, A. F. (2012). "THE SOCIAL MEDIA AS A PUBLIC SPHERE: THE RISE OF SOCIAL OPPOSITION". *International Conference on Communication, Media, Technology and Design*, 490 - 494.
- Septiani, I. D. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul*, 1(2), 108-116.
- Shao, P., & Wang, Y. (2017). How does social media change Chinese political culture? The formation of fragmented public sphere. *Telematics and Informatics*, 34, 694 - 704.
- Shonk, K. (2009, February 17). *coalition - PON*. Program on Negotiation at Harvard Law School. Retrieved July 10, 2023, from <https://www.pon.harvard.edu/daily/co>
- Sinaga, R. (2023). PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLISI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN "KLITIH" DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA.
- Sinuraya, S. I. (2022, Oktober). Dampak Klitih Terhadap Pariwisata dan Pendidikan di Kabupaten Sleman. *Indonesian Governance Journal*, 05(02), 130. <https://doi.org/10.24905/igj.5.2.2022.129-141>
- Sumantri, P. R. (2023). Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 501-511